

Metode Analisis Kebijakan Ekonomi Menggunakan Pendekatan Teori Wacana Kritis : Sebuah Pengantar

David Samuel Latupeirissa

Jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Kupang

Email: latupeirissadavid1@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang didasarkan pada kajian literature. Tujuannya adalah untuk memaparkan teori Analisis Wacana Kritis sebagai dasar teori dan metode analisis kebijakan ekonomi bisnis. Sebagai kajian dasar, penelitian ini berusaha memaparkan tiga level analisis model Analisis Wacana Kritis Fairclough (1989, 1995, 2005, 2006), kemudian menghubungkannya dengan usaha menganalisis kebijakan ekonomi bisnis. Analisis kebijakan dimaksud lebih dikhususkan pada analisis kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang lazim dilakukan dalam cakrawala ilmu ekonomi bisnis. Ketiga level analisis yang harus dilakukan dalam menganalisis kebijakan ekonomi bisnis adalah (1) analisis teks, yaitu analisis unsur kebahasaan dalam konstruksi kalimat yang dipakai dalam menyusun kebijakan, (2) analisis praktik diskursus, yaitu analisis latar belakang para pemegang keputusan yang menyusun kebijakan dan situasi dan kondisi lainnya yang melatari lahirnya kebijakan ekonomi bisnis, serta (3) analisis perubahan sosial budaya dan politik yang terjadi akibat kebijakan- kebijakan tersebut. Sebagai usulan konkrit, peneliti mengusulkan agar teori serta metode Analisis Wacana Kritis dapat digunakan dalam menganalisis kebijakan- kebijakan ekonomi bisnis yang ada.

Kata Kunci: Analisis Wacana Kritis, Teori dan Metode, Kebijakan Ekonomi

Abstract

This research is a qualitative research that based on a literature review. The aim is to describe the theory of Critical Discourse Analysis as the basis for the theory and method of economic policy analysis. As a basic study, this study seeks to present three levels of analysis of the Fairclough Critical Discourse Analysis model (1989, 1995, 2005, 2006). It is linked with the business of analyzing economic policies. The policy analysis is more devoted to the analysis of fiscal policy and monetary policy which is commonly carried out in the horizon of economics. The three levels of analysis that must be conducted in analyzing economic policies are (1) text analysis, namely the analysis of linguistic elements in the construction of sentences used in compiling policy, (2) analysis of discourse practices, namely the background analysis of the decision holders who issue policies, and (3) analysis of socio-cultural and political changes that occur as a result of these policies. As a concrete proposal, the researcher proposes that the theories and methods of Critical Discourse Analysis can be used in analyzing economic policies.

Key Words: Critical Discourse Analysis, Theory and Method, Economics Policies

I. PENDAHULUAN

Kebijakan ekonomi bisnis merupakan sebuah fenomena penting yang sifatnya berbanding lurus dengan keadaan ekonomi suatu masyarakat. Jika kebijakan yang dibuat pemegang keputusan tidak maksimal, maka keadaan ekonomi suatu masyarakat juga tidak maksimal. Jika keadaan ekonomi tidak maksimal, maka masa depan bangsa juga tidak maksimal.

Mengingat kebijakan ekonomi bisnis merupakan hal yang krusial, maka setiap kebijakan yang berkaitan dengan eksistensi ekonomi dan bisnis suatu daerah perlu dianalisis secara kritis. Hal ini diperlukan demi kebaikan kebijakan itu sendiri dan demi stabilitas perekonomian suatu daerah. Tulisan ini dibuat sebagai bentuk tanggapan atas pernyataan di atas, yaitu untuk memaparkan teori Analisis Wacana Kritis (Selanjutnya disebut AWK), yang dapat dijadikan dasar teori, sekaligus metode untuk menganalisis kebijakan perekonomian secara kritis. Kebijakan yang dimaksud lebih tertuju pada kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.

Selanjutnya, tulisan ini tergolong tulisan dengan kadar novelitas yang tinggi. Dinyatakan demikian karena sejauh penelusuran penulis, belum ada peneliti, dalam hal ini peneliti Indonesia, yang menggunakan teori dan metode AWK untuk menganalisis kebijakan ekonomi bisnis. Para peneliti sebelumnya cenderung memakai teori ini untuk menganalisis masalah politik dan masalah sosial, baik yang muncul dalam bentuk wacana kebijakan, maupun wacana tulisan surat kabar. Oleh karena itu, penulis memaparkan teori dan metode AWK sebagai sebuah usulan akademis dalam membedah kebijakan ekonomi bisnis suatu instansi/negara.

Pada akhirnya, tulisan ini diharapkan membawa manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, bagi para praktisi dan para peneliti bidang ekonomi bisnis. Manfaat praktis yang diharapkan berkaitan dengan pengetahuan tambahan bagi pembaca, sedangkan manfaat teoritis yang diharapkan berkaitan dengan perkembangan teori ilmu ekonomi bisnis dan ilmu linguistik. Dengan

menghadirkan sebuah pengantar teori dan metode linguistika dalam menganalisis kebijakan ekonomi, cakrawala penelitian interdisipliner semakin terbuka dengan warna ilmiah yang lebih menarik.

II. METODE

Tulisan ini tergolong penelitian kualitatif yang didasarkan pada kajian literature. Paradigma kualitatif bertujuan untuk melukiskan kondisi dan fenomena apa adanya. Denzin dan Lincoln (2000) mengatakan, penelitian kualitatif mengandung sebuah pendekatan dan penginterpretasian makna yang alami:

"This means that qualitative researchers study things in their natural settings, attempting to make sense of, or to interpret, phenomena in terms of the meanings people bring to them" (Denzin, et al. 2000; 4).

Jadi, sebagai bagian dari penelitian kualitatif, tulisan ini menginterpretasi makna teori AWK dan dihubungkan dengan metode analisis kebijakan ekonomi bisnis.

Dalam kaitan dengan kajian literature, tulisan ini mendasarkan pembahasannya pada literatur yang membahas teori-teori AWK. Teori dimaksud adalah *non-economics theory*¹. Dengan kata lain, data penelitian dalam tulisan ini tidak didasarkan pada *field research paradigm*² yang mengambil data dari lapangan. Sebaliknya, seperti yang telah disebutkan, tulisan ini memaparkan kajian pustaka mengenai teori-teori AWK dan kemungkinan-kemungkinan penerapannya pada analisis kebijakan ekonomi bisnis.

Selanjutnya, metode yang digunakan untuk memaparkan pembahasan dalam tulisan ini adalah metode deskriptif kualitatif. Pembahasannya dipaparkan menggunakan kata dan kalimat, bukan menggunakan angka-

¹ Bukan teori pada ilmu ekonomi bisnis.

² Konsep *field research paradigm* menerapkan penelitian ilmiah dengan mengambil data dari lapangan, serta mengolah dan membedah data berdasarkan teori tertentu. Tujuannya antara lain untuk menguji teori atau untuk menampilkan fenomena lapangan apa adanya.

angka³. Pembahasan tersebut bersifat teoritis dengan menghadirkan usulan konkrit yang berkaitan dengan judul penelitian, tanpa melakukan pengujian teori dan pendapat. Hal ini berterima dalam penelitian kualitatif. Lebih jauh lagi, sebagai tulisan yang sifatnya pengantar, hal ini lumrah adanya

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan ekonomi bisnis yang lazim dianalisis adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah Kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah.

Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variabel-variabel berikut: (1) Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi, (2) Pola persebaran sumber daya, dan (3) Distribusi pendapatan.

Pemerintah menjalankan kebijakan fiskal adalah dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian atau dengan perkataan lain, dengan kebijakan fiskal pemerintah berusaha mengarahkan jalannya perekonomian menuju keadaan yang diinginkannya. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional yang juga akan mempengaruhi kesempatan kerja, dapat mempengaruhi tinggi rendahnya investasi nasional, dan dapat mempengaruhi distribusi penghasilan nasional (bdk. Nanga, 2005).

Di sisi lain, kebijakan moneter adalah kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan

moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil (bdk. Nopirin, 1992). Berdasarkan pandangan awal penulis, kedua kebijakan dimaksud dapat dianalisis secara kritis melalui Teori linguistika AWK. Teori tersebut juga dapat dijadikan sebagai metode analisis.

AWK merupakan perkembangan lanjutan teori Analisis Wacana (*Discourse Analysis*). Untuk memahami teori ini secara mendalam, konsep wacana perlu diperhatikan terlebih dulu. Istilah wacana berasal dari bahasa Sanskerta wac/ wak/ vak yang berarti 'berkata', 'berucap' (Douglas dalam Mulyana, 2005). Pada sisi lain, Purwoko (2007) menyatakan bahwa kajian wacana dapat digunakan secara luas. Dalam kajian linguistik, istilah wacana dimaksudkan untuk menyebut unit bahasa yang lebih besar dari kalimat. Wacana merupakan satuan kebahasaan terlengkap, yang dalam hierarki kebahasaan merupakan satuan gramatikal tertinggi dan terbesar yang dapat direalisasikan atau diwujudkan dalam bentuk kata, kalimat, paragraf atau suatu karangan utuh (Kridalaksana, 1984). Tulisan ini melihat kebijakan ekonomi bisnis sebagai suatu wacana.

Para linguist⁴ memperkenalkan istilah wacana sebagai terjemahan dari kata bahasa Inggris *discourse* (Oetomo, 1993). Kata *discourse* ini berasal dari bahasa latin *discursus* yang berarti 'lari ke sana kemari', 'lari bolak-balik' atau 'lari dari arah yang berbeda' (bdk. Mulyana, 2005:4; Purwoko, 2007: 2). Di sisi lain, kata *discourse* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai "komunikasi kata-kata", "ekspresi gagasan-gagasan", "percakapan", dan "risalah tulis berupa naskah pidato, ceramah dan sebagainya" (Bustan, 2010: 4). Dilihat dari segi makna, istilah yang diangkat para linguist mendukung pendapat penulis dalam

³ Jika terdapat angka, hal tersebut tidak ditujukan untuk menarik kesimpulan, sebaliknya hanya bersifat keterangan, sebagai bagian dari kata benda numeral.

⁴ Linguist adalah ahli bahasa. Pendapat mereka diangkat dalam penelitian ini mengingat teori wacana dan teori Analisis Wacana Kritis merupakan teori yang lahir dari kajian kebahasaan (pada perkembangannya, teori ini digunakan dalam berbagai kajian/ *interdisipliner research* seperti kajian wacana politik atau budaya).

memandang kebijakan ekonomi bisnis sebagai sebuah wacana yang harus dianalisis.

Berikutnya, berdasarkan asal kata dan berbagai pengertian di atas, serta pada perkembangan selanjutnya, para ahli dari aliran linguistik yang berbeda kemudian merumuskan konsep '*discourse*' (wacana) secara berbeda. Konsep wacana tersebut terbagi atas dua pandangan kelompok, yaitu kelompok strukturalis dan kelompok post-strukturalis. Pandangan kelompok strukturalis dicetuskan oleh de Saussure (1857-1913). Berdasarkan pandangan kaum strukturalis, wacana merupakan alat untuk memahami realitas secara objektif.

Berbeda dengan pandangan kaum strukturalis, kaum post-strukturalis tidak sekedar melihat wacana sebagai alat untuk memahami realitas yang objektif saja, namun lebih dari itu, wacana merupakan alat untuk melakukan kontrol terhadap maksud-maksud tertentu (Sim dan Loon, 2008). Pandangan kaum post-strukturalis juga dipakai dalam tulisan ini. Kebijakan ekonomi bisnis bukan hanya wacana biasa yang harus dikaji, namun melihat kebijakan itu sendiri sebagai alat untuk melakukan kontrol untuk mendukung maksud tertentu/ maksud terselubung⁵.

Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe (1985) sebagai tokoh post-strukturalis menyatakan bahwa wacana mengonstruksi makna dalam dunia sosial, dan secara mendasar menyatakan bahwa bahasa sifatnya tidak stabil dan makna tidak pernah bersifat permanen. Laclau dan Mouffe (1985) menyatakan bahwa tidak ada wacana yang merupakan entitas tertutup, sebaliknya wacana senantiasa mengalami transformasi yang disebabkan oleh hubungan atau interaksi dengan wacana lain. Teori ini melahirkan berbagai konsep mengenai wacana, di antaranya konsep yang dikemukakan oleh Crystal (1992:25) seperti kutipan di bawah ini.

'...discourse is a continuous stretch of (especially spoken) language larger than a sentence, often constituting a coherent unit such as

a sermon, argument, joke, or narrative...'

Definisi di atas mempunyai pengertian bahwa wacana merupakan suatu rangkaian bahasa yang berkesinambungan, yang lebih besar dari kalimat dan merupakan suatu unit yang koheren seperti khotbah, argumentasi atau narasi. Jadi, kata *discourse* 'wacana' sebenarnya mengandung makna yang sangat luas dalam cakupan kehidupan manusia. Hal ini sejalan dengan pendapat Van Dijk yang menyatakan bahwa wacana bukan saja merupakan kalimat namun suatu tindakan (Titschaer dkk, 2009:43).

Selanjutnya, Fiona dan Tim (2015: 119) menyatakan bahwa wacana pada sisi yang lain dapat diartikan sebagai praktik penggunaan ideologi dalam hubungannya antara sosial dengan status serta kekuasaan dan identitas. Pandangan ini merupakan salah satu pandangan kaum post-strukturalis yang berterima dengan salah satu permasalahan ilmiah yang diangkat. Di sisi lain, Cook (1997: 6) berpendapat bahwa *kinds of language-language in use, for communication – is called discourse*. Berdasarkan pendapat tersebut, Cook (1997) kemudian mendefinisikan wacana (*discourse*) sebagai *stretches of language perceived to be meaningful, unified, and purposive*; yang berarti wacana merupakan rentetan kalimat yang berkaitan sehingga membentuk makna yang serasi di antara kalimat-kalimat itu. Dengan demikian, sebuah rentetan kalimat tidak dapat disebut wacana jika tidak ada keserasian makna.

Sebaliknya, rentetan kalimat membentuk wacana karena dari rentetan tersebut terbentuk makna yang serasi. Pada poin ini, Cook (1997) hendak menyatakan bahwa pengertian dari sebuah wacana dapat berubah ubah sesuai dengan konteks sosial politik dan budaya di mana wacana itu dilahirkan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kebijakan ekonomi bisnis, dalam tulisan ini dipandang sebagai sebuah wacana. Wacana dimaksud mengandung kepentingan golongan tertentu dan digunakan sebagai tindakan menghegemoni golongan yang tidak sejalan dengan para pembuat kebijakan.

⁵ Pendapat ini melihat kebijakan ekonomi bisnis sebagai bentuk pertarungan kekuasaan (hal tersebut akan dibahas pada poin selanjutnya).

Lebih jauh lagi, terdapat tiga pandangan yang melahirkan berbagai teori analisis wacana sebagaimana disampaikan oleh Hikam dalam Badara (2012). Pandangan yang pertama yakni pandangan kaum positivisme-empiris, yang kedua pandangan kaum strukturalis dan yang ketiga adalah pandangan post-strukturalis. Penelitian ini menggunakan teori Analisis Wacana Kritis (AWK) yang merupakan aliran dari pandangan post-strukturalis.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini dipaparkan tiga pandangan tentang analisis wacana yang sejauh ini berkembang. Pertama, pandangan positivisme-empiris. Dalam pandangan positivisme empiris, bahasa adalah piranti yang menjembatani manusia dan objek di luar dirinya. Salah satu ciri pandangan ini adalah pemisahan antara pemikiran dan realitas. Menurut pandangan ini, orang tidak perlu mengetahui makna objektif atau nilai-nilai yang mendasari suatu pernyataan karena hal yang terpenting adalah apakah sebuah pernyataan dinyatakan secara benar menurut kaidah sintaksis. Teori analisis wacana dalam pandangan ini hanya menitikberatkan analisisnya hanya secara gramatikal. Demikianlah pandangan pertama mengenai analisis wacana.

Pandangan kedua adalah pandangan konstruktivisme yang melihat bahasa tidak hanya sebagai alat untuk memahami realitas objektif yang dipisahkan dari subjek sebagai penyampai bahasa. Dengan kata lain, pandangan ini menolak pandangan positivisme-empiris. Dalam pandangan konstruktivisme, bahasa tidak bisa terlepas dari subjek yang menghasilkannya. Subjek adalah faktor sentral dalam aktivitas kewacanaan dan hubungan-hubungan sosialnya (bdk. Mulyana, 2005). Berdasarkan pandangan ini, analisis wacana hanya difokuskan pada subjek dalam kaitannya dengan hubungan sosial.

Ketiga, pandangan post-strukturalis yang dikenal dengan Analisis Wacana Kritis (AWK). AWK merupakan pandangan yang lebih progresif dari konstruktivisme. Konstruktivisme dianggap kurang peka terhadap proses produksi dan reproduksi makna yang terjadi secara historis dan institusional (bdk. Lubis, 2014) AWK

menganggap konstruktivisme belum mampu menganalisis faktor-faktor hubungan kekuasaan yang selalu melekat dalam setiap wacana yang pada gilirannya berperan dalam menghasilkan bentuk-bentuk wacana. Hubungan kekuasaan, terutama dalam pembentukan subjek dan berbagai tindak representasi dalam masyarakat, melahirkan paradigma kritis atau analisis wacana kritis (bdk. Mulyana, 2005). Dalam tulisan ini, setiap kebijakan ekonomi bisnis yang ada, dianggap berkaitan erat dengan hubungan kekuasaan demi kepentingan suatu golongan.

Bahasa dalam kebijakan ekonomi bisnis dipahami lebih dari sekadar perpanjangan subjek. Wacana adalah produksi dan representasi relasi kekuasaan yang lebih luas, baik itu kekuasaan politik, sosial, budaya, maupun ekonomi bisnis. Tampilan wacana ke publik merupakan hasil sebuah strategi seseorang atau sekelompok orang yang ingin mendapatkan dan / atau melanggengkan kekuasaannya dalam masyarakat (Badara, 2012).

Kata kunci dalam AWK adalah ideologi, kekuasaan, produksi teks, strategi wacana, pertarungan wacana, konteks social budaya dan politik, dan lain sebagainya. Istilah-istilah itu adalah ciri khas dari teori Analisis Wacana Kritis (bdk. Coupland dan Jaworski, 2001: 145-148). Dalam AWK, orang tidak memandang wacana semata-mata sebagai teks linguistik melainkan sebagai teks kebudayaan yang lebih luas, sebagai produk yang melewati proses produksi yang panjang dan dipengaruhi sekian kondisi, situasi, ideologi, pandangan dan kekuasaan tertentu (Latupeirissa, 2014).

3.1 Teori Analisis Wacana Kritis (AWK)

Santoso (2009:53) menyatakan, ada beberapa tokoh linguistik kritis yang turut mengembangkan teori AWK, antara lain: Foucault (1926-1984), Fowler (1985;1986;1996), Fairclough (1989, 1995, 2005, 2006), Kress (1985), Sykes (1985), Van Dijk (1985; 2001), West dan Zimmerman (1985), Birch (1996), dan Wodak (1996). Tokoh-tokoh tersebut merupakan penganut ilmu-ilmu kritis yang menggugat paham strukturalisme (bdk. Sim dan Loon, 1998). Dalam perkembangan selanjutnya, Jørgensen, dkk (2010: 115) menyatakan bahwa dari berbagai model teori

AWK yang dikembangkan oleh para tokoh di atas, terdapat dua teori yang paling sering digunakan. Kedua teori tersebut mewakili teori-teori AWK lainnya karena tergolong sebagai pendekatan yang paling cepat perkembangannya di bidang komunikasi, budaya dan masyarakat. Kedua teori AWK tersebut adalah teori yang dikembangkan oleh Van Dijk (1985; 2001) dan teori yang dikembangkan oleh Fairclough (1989, 1995, 2005, 2006). Pada sisi yang lain, (Adi, 2011) menyatakan bahwa dari semua teori AWK yang berkembang, hanya teori AWK Van Dijk (2001, 2014) dan Fairclough (1989, 1995, 2005, 2006) yang menganalisis teks sampai pada level makro.

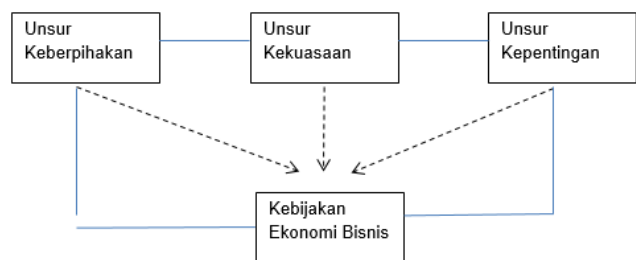
Tulisan ini mengangkat teori AWK model Fairclough (1989, 1995, 2005, 2006) sebagai teori dan metode analisis kebijakan ekonomi bisnis. Pemilihan AWK model Fairclough (1989, 1995, 2005, 2006) didasari pada dua hal; *Pertama*, AWK ini merupakan AWK yang paling populer dalam dasawarsa terakhir ini (Adi, 2011); *Kedua*, dibandingkan dengan AWK van Dijk (2001, 2014), AWK Fairclough (1989, 1995, 2005, 2006) memiliki kelebihan dari AWK van Dijk (2001, 2014) karena AWK Fairclough menganalisis wacana sampai pada tahapan 'perubahan sosial budaya masyarakat'. Dalam hal ini, AWK Fairclough (1989, 1995, 2005, 2006) melihat pengaruh kebijakan ekonomi bisnis yang dianalisis, dalam hubungannya dengan perubahan sosial budaya masyarakat di mana kebijakan tersebut diambil.

Menurut Fairclough setiap wacana yang muncul dalam bentuk teks, percakapan, atau apapun, tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, wajar, dan netral, tetapi merupakan bentuk perjuangan dan pertarungan kekuasaan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, setiap kebijakan ekonomi bisnis yang diambil merupakan bentuk perjuangan dan pertarungan. Untuk itu, kebijakan-kebijakan tersebut perlu dianalisis secara kritis. Lebih lanjut, Fairclough (1995a) mengatakan bahwa teks dinilai sebagai domain representasi dan signifikasi dunia dan pengalaman serta terbuka untuk berbagai interpretasi. Menurutnya, wacana seseperti apa pun adalah bentuk pertarungan kekuasaan. Dengan demikian, setiap analisis wacana selalu

dikaitkan dengan dimensi-dimensi kekuasaan (bdk. Latupeirissa, 2014).

Jørgensen dkk (2010) menyatakan bahwa pendekatan kritis menurut Fairclough memiliki dasar teoretis dalam memandang hubungan timbal balik antara peristiwa mikro (tindak verbal) dan struktur-struktur makro yang mengondisikan dan menghasilkan peristiwa mikro itu. Pendekatan kritis menolak batas yang tegas antara kajian mikro dan kajian makro. Dengan dialektika antara makro dan mikro dalam kajiannya, analisis wacana kritis dapat mengungkap gejala-gejala naturalisasi paham yang terjadi serta memetakan secara jelas bentuk-bentuk determinasi sosial serta pengaruh wacana bagi partisipan.

Berdasarkan pendapat para ahli seperti yang sudah disebutkan di atas, analisis kebijakan ekonomi bisnis perlu mendasari konsep kebijakan sebagai sebuah wacana yang tidak netral. Kebijakan tersebut adalah sebuah tindakan hegemonis yang dilakukan oleh para aktor. Para aktor adalah para pengambil keputusan yang merumuskan kebijakan dimaksud. Tujuan kebijakan-kebijakan diambil yaitu untuk memenangkan pertarungan kekuasaan. Pertarungan kekuasaan dapat terjadi secara langsung maupun secara tersembunyi. Di bawah ini digambarkan peta konsep dimaksud.



Gambar 1
Bagan konsep makna 'Kebijakan
Ekonomi Bisnis' dalam perspektif AWK

Keterangan:

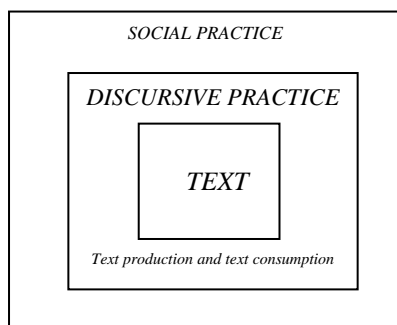
= Tindakan

→ = Mempengaruhi

= Hubungan Dialektika Wacana

Berikutnya, untuk memahami wacana secara utuh, menurut Fairclough (1989, 1995, 2005, 2006), perlu ada tiga tingkatan, atau

aspek analisis yang dilakukan⁶. Tiga tingkatan atau aspek tersebut, dalam istilah lain disebut sebagai tiga level analisis (*bdk.* Latupeirissa *et al.*, 2018, 2019a, 2019b: Latupeirissa, 2019). Ketiga level analisis model Fairclough merupakan teori yang sekaligus dapat dijadikan metode AWK. Pertama adalah analisis level teks, kedua adalah analisis praktik diskursif yang menyangkut praktik produksi teks dan konsumsi teks dan yang terakhir adalah analisis praktik sosio-kultural. Ketiga tingkatan analisis di atas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Dimensi Wacana Menurut Fairclough

Sumber: Jørgensen, Marriane dan Phillips, Louise J. (2002:68)

Analisis teks dilakukan secara sintaksis, paradigmatis ataupun kombinasi keduanya. Analisis sintaksis bermaksud melihat kosa kata yang dipakai, melihat aspek semantis⁷ dan kalimat. Analisis ini juga menekankan koherensi dan kohesivitas, bagaimana relasi antarkata dan antarkalimat membentuk pengertian tertentu. Analisis paradigmatis adalah analisis teks dengan memerhatikan simbol atau tanda-tanda yang digunakan dalam teks untuk menemukan makna secara keseluruhan (Jørgensen, dkk., 2010:127). Pada analisis ini, kebijakan- kebijakan ekonomi bisnis yang diambil perlu diteliti secara seksama, khususnya menyangkut kosa kata yang digunakan, konstruksi kalimat yang dipakai, dan makna tersembunyi apa yang ada

di balik teks kebijakan. Konstruksi bahasa yang digunakan perlu dilihat secara seksama, dari berbagai segi.

Menyangkut kosa kata yang digunakan dan konstruksi kalimat yang digunakan, seorang analis kebijakan ekonomi bisnis perlu melihat setiap bentuk kalimat yang ada; Misalnya, kalimat dalam kebijakan tersebut cenderung menggunakan kalimat aktif atau kalimat pasif. Jika lebih banyak menggunakan kalimat pasif, ada kemungkinan kebijakan tersebut berusaha menyembunyikan atau melindungi aktor tertentu. Sebaliknya, jika lebih banyak menggunakan kalimat aktif, ada kemungkinan kebijakan tersebut lebih bersifat hegemonis. Contoh lain dalam analisis ini adalah dengan melihat kompleksitas kalimat yang akan menimbulkan ambiguitas.

Berkaitan dengan kosa kata, seorang analis kebijakan yang kritis dapat menggunakan metode kuantitatif, yaitu dengan menghitung kosa kata tertentu, yang secara semantis berada dalam medan maknanya yang sama, yang lebih cenderung digunakan dalam sebuah kebijakan. Kosa kata yang dominan tersebut merupakan kendaraan ideologi tertentu.

Selanjutnya, dengan melihat konstruksi pembagian poin/ paragraph/ sub-bab/ bab. Dengan metode kuantitatif, seorang analis kritis dapat menghitung bilamana ada sesuatu hal yang ditulis dalam jumlah poin/ paragraph/ sub-bab/ bab yang lebih banyak. Misalnya, dalam kebijakan ekonomi bisnis 'A', topik 'X', dan 'Y' sama- sama dibicarakan. Namun, setelah dilihat dengan sudut pandang AWK, ternyata topik 'Y' lebih banyak muncul dalam pembagian paragraph. Hal ini dapat dimaknai bahwa 'Y' dianggap lebih penting dari 'X'. Demikian beberapa buah pemikiran yang berkaitan dengan AWK level teks dalam sebuah kebijakan Ekonomi bisnis .

Pokok- pokok pikiran di atas bersifat usulan. Usulan- usulan tersebut dapat dipilih berdasarkan data lapangan⁸. Inti dari analisis level pertama adalah analisis makna bahasa

⁶ Ketiga tingkatan ini merupakan tingkatan analisis yang dijadikan parameter analisis kebijakan. Dengan kata lain, Tiga level analisis yang dipaparkan merupakan *core discussion* dalam tulisan ini.

⁷ Semantik adalah cabang ilmu linguistik yang mengkaji makna bahasa (Hurford, et al, 2007).

⁸ Dalam penerapannya di lapangan, analisis level teks mengikuti data lapangan yang diperoleh. Dalam kasus tertentu seorang peneliti bisa mengkhususkan penelitiannya dengan hanya melihat makna bahasa, dalam kasus tertentu, peneliti juga bisa melihat segala aspek kebahasaan yang digunakan dalam analisisnya.

secara terperinci, analisis kekuatan dan kelemahan bahasa yang digunakan dalam merumuskan kebijakan, dan analisis interpretasi dari bahasa kebijakan.

Level analisis kebijakan ekonomi bisnis kedua adalah level praktik diskursif. Dalam analisis level praktik diskursif, yang ditelaah dalam AWK Fairclough (1989, 1995, 2005, 2006) adalah proses produksi dan proses konsumsi teks. Fairclough (dalam Jørgensen dkk, 2010) menekankan kaitan praktik diskursif dengan kondisi kewacanaan dan non-kewacanaan yang mempengaruhi produksi wacana atau konstruksi realitas (wacana) oleh suatu kekuatan sosial. Analisis pada level ini dilakukan dengan mengaitkan teks dan praktik. Interpretasi teks atau gejala dalam dirinya diikuti dengan penafsiran terhadap bentuk praktik diskursif menyangkut apa yang ada di balik wacana kebijakan ekonomi.

Secara lebih eksplisit, dalam menganalisis sebuah kebijakan ekonomi bisnis, seorang analis kritis perlu melihat latar belakang atau faktor 'kemengapaan' dari kebijakan tersebut. Ini yang disebut dengan analisis praktik diskursif. Beberapa pertanyaan yang wajib direnungkan seorang analis kritis adalah: (1) 'mengapa kebijakan ini muncul', (2) 'siapa yang membuat kebijakan ini', (3) 'bagaimana latar belakang pengambil keputusan', (4) 'bagaimana respon orang tentang kebijakan ini'. Analisis ini dilakukan berdasarkan apa yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa tidak ada muatan wacana yang netral dalam 'kaca mata' AWK, atau dengan kata lain, tidak ada kebijakan ekonomi bisnis yang netral dalam praktiknya. Sebaliknya, paradigma AWK memandang setiap kebijakan ekonomi bisnis sebagai bentuk pertarungan kekuasaan yang tidak pernah netral.

Yang terakhir adalah analisis kebijakan ekonomi bisnis level ketiga. Level ketiga adalah praktik sosiokultural. Teori AWK Fairclough pada level ketiga menganalisis tatanan wacana yang ada dan bagaimana aktor-aktor sosial mencoba merubah atau mendukung tatanan wacana tersebut (bdk. Jørgensen, 2010. Latupeirissa, 2014). Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa konteks sosial yang ada di luar praktik kewacanaan mempengaruhi bagaimana wacana muncul

dan menampilkan dirinya. Praktik sosiokultural memang tidak berhubungan langsung dengan teks tetapi menentukan bagaimana teks diproduksi dan dipahami melalui perantaraan praktik diskursif. Analisis teori AWK Fairclough yang dilakukan pada tahapan ini disebut sebagai eksplanasi atau analisis sosial, yang terdiri dari tingkat situasional (konteks sosial yang khas ketika wacana muncul), institusional (pengaruh institusi organisasi dalam praktik produksi wacana), dan yang terakhir adalah societal (aspek makro seperti sistem politik, sistem ekonomi atau sistem budaya masyarakat secara keseluruhan yang menentukan siapa yang berkuasa, nilai-nilai apa yang dominan dan mempengaruhi proses produksi wacana) (bdk. Jørgensen dkk, 2010:131).

Secara pragmatis, analisis pada level terakhir ini melihat perubahan sosial budaya yang dihasilkan dari sebuah kebijakan ekonomi bisnis. Pertama, analis perlu melihat situasi awal sebelum kebijakan tertentu mengenai ekonomi bisnis diambil. Kedua, analis perlu melihat situasi yang berubah setelah kebijakan tersebut diambil. Adakah perubahan signifikan yang membawa dampak positif bagi orang sekelilingnya, dan lain sebagainya. Analisis kebijakan ekonomi bisnis level ketiga ini dilakukan dengan cara uji statistik, atau dengan menyebarkan angket, dan wawancara.

Demikianlah seorang analis kebijakan ekonomi bisnis perlu menganalisis kebijakan ekonomi bisnis pada tiga level, yaitu (1) analisis level teks, (2) analisis level praktik diskursif, dan (3) analisis level praktik sosiokultural. Analisis tiga level seperti yang sudah disampaikan tersebut niscaya akan menghasilkan sebuah hasil analisis kebijakan ekonomi bisnis yang kritis, dengan harapan kebijakan itu sendiri akan lebih baik, dan output ekonomi bisnis ke depannya akan lebih bermutu.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, disimpulkan bahwa berdasarkan pandangan teori AWK, kebijakan ekonomi, baik kebijakan fiskal maupun kebijakan

moneter adalah kebijakan yang tidak netral. Kebijakan- kebijakan yang dihasilkan oleh pemegang keputusan dalam sebuah instansi tertentu atau dalam negara tertentu adalah tindakan pertarungan untuk menghegemoni kelompok tertentu. Tindakan- tindakan ini ada yang membawa kebaikan bagi perkembangan ekonomi bisnis sebuah instansi/ negara, sebaliknya ada yang membawa keburukan bagi instansi/ negara tertentu. Untuk itu, kebijakan ekonomi bisnis yang berkaitan dengan hal ini perlu dianalisis secara kritis.

4.2 Saran

Menanggapi pembahasan di atas, penulis mengusulkan teori AWK Fairclough (1989, 1995, 2005, 2006) sebagai teori dan metode analisis kebijakan ekonomi bisnis. Teori ini menganalisis wacana kebijakan ekonomi bisnis dalam tiga level, yaitu (1) level teks untuk melihat makna tersembunyi atau maksud dalam bahasa yang digunakan dalam kebijakan itu sendiri, (2) level praktik diskursif untuk melihat aktor pembuat kebijakan dan situasi atau latar belakang kebijakan tertentu dilahirkan, dan (3) level praktik sosiokultural, yaitu dengan melihat hasil atau perubahan signifikan yang dihasilkan dari kebijakan itu sendiri.

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa tulisan ini merupakan sebuah pengantar yang harus dikaji lebih jauh, baik secara teoritis, maupun secara praktis. Secara teoritis yaitu dengan melihat lebih jauh teori- teori lainnya yang dapat disandingkan dengan teori AWK dalam menganalisis kebijakan ekonomi bisnis, secara praktis yaitu dengan mengadakan penelitian lapangan menggunakan teori dan metode AWK untuk mengkaji kebijakan ekonomi bisnis tertentu. Untuk itu, penelitian lanjutan yang berkaitan dengan tulisan ini sangat penulis harapkan.

DAFTAR REFERENSI

Adi, T. N. 2011. Critical Discourse Analysis - CDA. Sinaukomunikasi. wordpress. Diunduh pada 01 September 2015 di <http://sinaukomunikasi.wordpress.com/2011/08/18/critical-discourse-analysis-cda>.

- Badara, A. 2012. Analisis Wacana. Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Bustan, F. 2010. Wacana. Kupang: Undana Press.
- Cook, G. 1997. Discourse. Oxford: Oxford University Press.
- Coupland, N. dan Jaworski, A. 2001. Discourse, dalam The Routledge Companion to Semiotics and Linguistics. London: Routledge
- Crystal, D. 1992. Introducing Linguistics. Harlow: Penguin.
- Denzin N. and Lincoln Y. 2000. Handbook of Qualitative Research. London: Sage Publication Inc.
- Fairclough, N. 1989. Language and Power. New York: Longman Group.
- Fairclough, N. 1995a. Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language. London: Longman.
- Fairclough, N. 1995b. Media Discourse. London: Edward Arnold.
- Fairclough, N. 2003. Analysing Discourse Norman Fairclough: Textual Analysis for Social Research. London : Routledge
- Fairclough, N. 2005. Analysing Discourse. Textual Analysis for Social Research. Londong: Routledge.
- Fairclough, N. 2006. Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press.
- Fiona, E. dan Tim, M. 2015. Why Do Linguistics?. India: Deanta Global Publishing Services
- Foucault, M. 1978. The History of Sexuality. New York: Pantheon.
- Hurford J.R., Heasley B., Smith M. 2007, *Semantics: A Coursebook*. New York: Cambridge University Press.
- Jørgensen, M. dan Phillips, L. J. 2002. Discourse Analysis as Theory and Method. London: SAGE Publications.
- Jørgensen, M. dan Phillips, L. J. 2010. Analisis Wacana, Teori dan Metode. Terj. Imam Suyitno, dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kridalaksana, H. 1984. Keutuhan Wacana. Dalam Bahasa dan Sastra Indonesia, Tahun IV, No. I. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

- Kress, G. 1985. Ideological Structure in Discourse. Dalam: Handbook of Discourse Analysis Vol.4. Ed: Van Dijk.A.Teun 1985. Hlm.27-42 London:Academic Press.
- Laclau E. dan Mouffe C. 1985. Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics. London: Verso.
- Latupeirissa, D. S. 2014. Diskriminasi Gender Dalam Penggunaan Bahasa Indonesia di Surat Kabar Pos Kupang Dan Timor Express: Sebuah Analisis Wacana Kritis. Tesis. Kupang: Universitas Nusa Cendana.
- Latupeirissa, D.S., Laksana, I.K.D., Artawa, K. and Sosiowati, I.G.A.G., 2018. Repetition in Indonesian political language. *International journal of linguistics, literature and culture*, 4(6), pp.72-80.
<https://doi.org/10.21744/ijllc.v4n6.427>
- Latupeirissa, D.S., Laksana, I.K.D., Artawa, K. and Sosiowati, I.G.A.G., 2019. Revealing ideology of political speech. *International research journal of management, IT and social sciences*, 6(2), pp.79-91.
<https://doi.org/10.21744/irjmis.v6n2.654>
- Latupeirissa, D.S., Laksana, I.K.D., Artawa, K. and Sosiowati, I.G.A.G., 2019. On Political Language Ideology: Critical View of Indonesian President Speech. *Journal of Language Teaching and Research*, 10(4), pp.843-850.
<http://dx.doi.org/10.17507/jltr.1004.23>
- Latupeirissa D.S., 2019. Bahasa Politik Soekarno: Analisis Wacana Kritis. Disertasi. Denpasar: Universitas Udayana Denpasar.
- Lubis, A. Y. 2014. Postmodernisme Teori dan Metode. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mulyana. 2005. Kajian Wacana. Jogja: Tiara Wacana.
- Nanga, Muana. 2005. Makro Ekonomi: Teori, Masalah, dan Kebijakan, Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Nopirin. 1992. Ekonomi Moneter. Edisi II. Yogyakarta: BPFE.
- Oetomo, D. 1993. Pelahiran dan Perkembangan Analisis Wacana. Dalam PELBA 6. Yogyakarta : Kanisius.
- Purwoko, H. 2007. Discourse Analysis: Kajian Wacana bagi Semua Orang. PT. Macanan Jaya Cemerlang: Semarang.
- Purwoko, H. 2011. Kaitan Bahasa dan Politik dalam Perspektif Budaya. Makalah dalam Seminar Nasional FIB UNDIP, Semarang.
- Sim, S dan Loon, B. 2008. Mengenal Teori Kritis. Yogyakarta: Resist Book
- Titscher S., Mayer M., Wodak R., dan Vetter E. 2009. Metode Analisis Teks dan Wacana. Terj. Gazali. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Santoso, A. 2004. Analisis Wacana Kritis Penggunaan Metafora dalam Bahasa Politik Pasca-Orde Baru. Dipresentasikan pada Seminar Internasional bertajuk Developing Critical Thinking in a Democratic Society pada Lustrum ke-50 UM 2004.
- Santoso, A. 2008. "Jejak Halliday Dalam Linguistik Kritis Dan Analisis Wacana Kritis". Dalam Jurnal Bahasa Dan Seni, Tahun 36, Nomor 1, Februari 2008. Publishing Company.
- Van Dijk, T.A. 2001. Principles of Critical Discourse Analysis Discourse Theory and Practice: A Reader. London: SAGE Publications Ltd.
- Van Dijk, T.A 2014. Discourse and Knowledge: A Sociocognitive Approach. Cambridge: Cambridge University Press.
- Van Leeuwen, T. 2008. Discourse and Practice. New Tools for Critical Discourse Analysis. New York: Oxford University Press.